



PUTUSAN

NOMOR : 188/PID/2016/PT.DKI ✓

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : LIM SUTRISNO; ✓
Tempat lahir : Jakarta; ✓
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 21 Mei 1979; ✓
Jenis kelamin : Laki-laki; ✓
Kebangsaan : Indonesia; ✓
Tempat tinggal : Pluit Selatan Raya 7 RT 017 RW 06 Pluit
Penjaringan Jakarta Utara; ✓
Agama : Kristen; ✓
Pekerjaan : Swasta; ✓

Terdakwa tidak ditahan;-----

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : REGGIE TENTERO, SH.,MH dkk, para Advokat dan Penasihat Hukum dari Law Office " REGGIE TENTERO & PARTNERS " , beralamat di Plaza Abda 3 rd Floor Suite 3 D Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/RTP/SK/II/2016 tanggal 19 Januari 2016 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara : ✓
PDM.37/JKT.UT/12/2015 tanggal 17 Desember 2015, pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap para Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa LIM SUTRISNO bersama Hendri Yanto / Nahkoda (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira jam 09.15 Wib pada posisi 06 03'097"S-106 47'960"T atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014, bertempat di sekitar Perairan Teluk Jakarta, Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ✓

Halaman 1 dari Hal 9 Putusan Nomor 188/PID/2016/PT.DKI



mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang memperkerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apapun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:--- ✓

- Pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 terdakwa selaku Direktur Utama PT. Gonotirto yang bergerak dalam bidang usaha Jasa Angkutan Laut yang mempunyai armada kapal KM. Kota Silat XV memerintahkan Hendri Yanto/ Nahkoda KM. Kota Silat XV (berkas terpisah) untuk berangkat berlayar dari Pelabuhan Sunda Kelapa menuju Pontianak Kalimantan Barat tanpa terlebih dahulu mengecek dokumen apakah semua ABK sudah sesuai crewlist dan sudah disijilkan, namun kapal KM. Kota Silat XV yang dinahkodai oleh Hendri Yanto berangkat berlayar. Pada waktu kapal KM. Kota Silat XV sedang berlayar pada posisi 06 03'097"S-106 47'960"T, petugas Polair yang saat itu sedang melaksanakan tugas patroli dalam rangka penanggulangan dan pengantisipasi gangguan Kamtibmas di wilayah perairan Teluk Jakarta pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014, melihat kapal KM. Kota Silat XV yang sedang berlayar sekira jam 09.15 Wib petugas Polair melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. Kota Silat XV yang saat itu sedang berlayar, setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa jumlah ABK tidak sesuai dengan buku sijil/crewlist kapal, dalam crewlist jumlah ABK yang terdaftar sebanyak 16 (enam belas) orang yaitu :----- ✓

1. Hendrik Yanto selaku Nahkoda ;-----
2. Joko Susanto selaku KKM ;-----
3. Lan Masdi Selaku Serang ;-----
4. Yuniarso selaku Juru mudi ;-----
5. Robinson Sinaga selaku Juru Minyak ;-----
6. M Kardi Yandra selaku Juru Minyak ;-----
7. Rio Junaidi selaku juru minyak ;-----
8. Misbakhur Surur selaku juru mudi ;-----
9. Syahid Ibrahim selaku juru mudi ;-----
10. Natha Patta selaku juru minyak ;-----
11. Garip Mahfud selaku juru mudi ;----- ✓

Halaman 2 dari Hal 10 Putusan Nomor 188/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Khaerudin selaku koki/juru masak ;-----
13. Baud Dewing selaku Mualim I ;-----
14. Eric Sanjaya selaku Mualim II ;-----
15. Ruskanda selaku Masinis I ;-----
16. Sunarji selaku Masinis II ;-----

sedangkan yang berada diatas kapal KM. Kota Silat XV sebanyak 12 (dua belas) orang sehingga ada 4 (empat) orang yang tidak ikut berlayar yaitu : Baud Dewing selaku Mualim I, Erick Sanjaya Mualim II, Ruskanda selaku masinis I dan Sunarji selaku masinis II. Kemudian dari 12 orang ABK yang ada diatas kapal KM. KOTA SILAT XV diketahui yang tidak disijil ada 5 orang yaitu : -✓-----

1. Misbakhussurur selaku Juru Mudi ;-----
 2. Garif Mahpud selaku Juru Minyak ;-----
 3. Syahid Ibrahim selaku Juru Mudi ;-----
 4. Natha Patta Mayoro Rante selaku juru minyak ;-----
 5. Khaerudin selaku juru masak/koki. ;-----✓
- Kelima ABK kapal KM. Kota Silat XV yang tidak disijil dipekerjakan di PT. Gonotirto dimana terdakwa selaku Direktur Utama PT. Gonotirto bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan Perusahaan. PT. Gonotirto yang bergerak dalam bidang usaha Jasa Angkutan Laut. Walaupun ada 5 orang ABK yang tidak disijil terdakwa tetap memerintahkan kepada Nahkoda untuk memberangkatkan kapal KM. Kota Silat XV untuk berlayar menuju Pontianak sesaat setelah terdakwa menerima SIB (Surat Ijin Berlayar) dari syahbandar pelabuhan Sunda Kelapa tanpa terlebih dahulu memeriksa jumlah ABK baik tentang pensijilan maupun dokumen pelaut yang disyaratkan dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab dari owner/pemilik kapal, karena pengajuan daftar cwelist dan pensijilan ABK dilakukan oleh pihak PT. Gonotirto atas perintah terdakwa, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi ahli SUPRIYONO, MM yang menerangkan bahwa yang bertanggung jawab untuk keseluruhan kegiatan dan pengoperasian kapal serta untuk pensijilan ABK adalah terdakwa selaku owner / pemilik kapal. Pada saat terdakwa menyuruh Nahkoda kapal KM. Kota Silat XV untuk berangkat berlayar pada hari Kamis 16 Oktober 2014, Nahkoda tidak menolak perintah terdakwa untuk berlayar menuju Pontianak hal ini dilakukan Nahkoda karena terdakwa akan bertanggung jawab apabila terjadi masalah dalam perjalanan. ;-----✓

Halaman 3 dari Hal 10 Putusan Nomor 188/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;----- ✓

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** No.Reg.Perkara : PDM-1037/JKTUT/12/2015 tanggal 17 Maret 2016, terhadap para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **LIM SUTRISNO**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang memperkerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apapun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 312 UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap LIM SUTRISNO dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.;----- ✓

3. Menyatakan barang bukti : -----

A	:	1 (satu) bundel asli dokumen batubara sebagai berikut :
		<ul style="list-style-type: none">- 4 (empat) lembar asli resi muatan gudang; ✓- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan pengiriman hasil tambang No. 545/0388.B/PU/TAMBEN/20014 dari Dinas Pertambangan dan Energi Pemkab Tanah Bumbu Kalimantan Selatan Batu Licin tanggal 5 Juni 2014. ✓- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan asal barang No. 133/SKAB-AMR/BTL/VI/2014 dari PT. Astri Mining Resource Batu Licin tanggal 5 Juni 2014 ✓- 1 (satu) lembar fotocopy surat kirim barang No. 133/SKAB-AMR/BTL/VI/2014 dari PT. Astri Mining Resource Batu Licin tanggal 5 Juni 2014 ✓- 1 (satu) lembar fotocopy Shipping Instruction No. 026/SI/AMR/VI/2014 dari PT. Astri Mining Resource Batu Licin tanggal 27 Mei 2014 ✓- 1 (satu) lembar fotocopy Bill of Loading No. 160/BTL-BJN-VI/2014 Batu Licin tanggal 5 Juni 2014 ✓

Halaman 4 dari Hal 10 Putusan Nomor 188/PID/2016/PT.DKI



	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar fotocopy Cargo Manifest dari PT. Pelayaran Gema Bahari , Batu Licin 5 Juni 2014. ✓- 1 (satu) lembar fotocopy Statemen of Barge Draught Survey. ✓- 1 (satu) lembar surat jalan asli (batubara) nomor : 545/0388.B/PU/TAMBEN/20014 dari Dinas Pertambangan dan Energi Pemkab Muara enim tanggal 1 Pebruari 2014; ✓- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan asal barang No. 751/SKAB-DRP/Pertamb/2013 dari Bupati Muara enim PT. Astri Mining Rescource Batu Licin tanggal 5 Juni 2014 ✓- 1 (satu) lembar surat asli proses permohonan IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan An. Koperasi TNI-AL Jakarta 1 Januari 2013. ✓- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Muara Enim tentang Ijin Usaha Angkutan Umum untuk barang kepada Koperasi TNI-AL tanggal 18 Juli 2013. ✓- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Bupati Muara Enim No.503/02/KPTS/KPPT/2013 tentang Izin Usaha Angkutan Umum untuk Barang kepada Koperasi TNI-AL. ✓- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Nomor : 520/2379/KEP/IL06/2013 dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Lampung tentang Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dikeluarkan di Lampung tanggal 1 Januari 2013. ✓ <p>Dikembalikan kepada Terdakwa</p>
B	: 1.000 (seribu) karung batubara ✓ Dikembalikan kepada terdakwa ✓
C	: 1 (satu) bundel asli sertifikat Sijil ✓
D	: 1 (satu) lembar asli SPB (Surat Persetujuan Berlayar) ✓
E	: 1 (satu) lembar asli Crew List ✓
F	: 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Nakhoda tentang keberangkatan kapal pada pukul 16.00 Wib Sunda Kelapa 12 Oktober 2014. ✓ Tetap terlampir dalam berkas perkara ✓

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). ;-----

Halaman 5 dari Hal 10 Putusan Nomor 188/PID/2016/PT.DKI



3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor. 14/Pid.Sus/2016/PN.JKT.Utr tanggal 29 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **Terdakwa LIM SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN YANG MEMPERKERJAKAN SESEORANG DI KAPAL DALAM JABATAN APAPUN TANPA DISIJIL DAN TANPA MEMILIKI KOMPETENSI DAN KETRAMPILAN SERTA DOKUMEN PELAUT YANG DISYARATKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 145"**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LIM SUTRISNO** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan** dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan/pelanggaran atau tidak mencukupi sesuatu syarat sebelum habis **masa percobaan selama 4 (empat) bulan**;-----
3. Menjatuhkan pula **pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;-----
4. Memerintahkan barang bukti berupa: -----

A :	1 (satu) bundel asli dokumen batubara sebagai berikut :
	<ul style="list-style-type: none">- 4 (empat) lembar asli resi muatan gudang; ✓- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan pengiriman hasil tambang No. 545/0388.B/PU/TAMBEN/20014 dari Dinas Pertambangan dan Energi Pemkab Tanah Bumbu Kalimantan Selatan Batu Licin tanggal 5 Juni 2014. ✓- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan asal barang No. 133/SKAB-AMR/BTL/VI/2014 dari PT. Astri Mining Resource Batu Licin tanggal 5 Juni 2014 ✓- 1 (satu) lembar fotocopy surat kirim barang No. 133/SKAB-AMR/BTL/VI/2014 dari PT. Astri Mining Resource Batu Licin tanggal 5 Juni 2014 ✓

Halaman 6 dari Hal 10 Putusan Nomor 188/PID/2016/PT.DKI



	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar fotocopy Shipping Instruction No. 026/SI/AMR/V/2014 dari PT. Astri Mining Resource Batu Licin tanggal 27 Mei 2014 ✓- 1 (satu) lembar fotocopy Bill of Loading No. 160/BTL-BJN-VI/2014 Batu Licin tanggal 5 Juni 2014 ✓- 1 (satu) lembar fotocopy Cargo Manifest dari PT. Pelayaran Gema Bahari , Batu Licin 5 Juni 2014. ✓- 1 (satu) lembar fotocopy Statemen of Barge Draught Survey.- 1 (satu) lembar surat jalan asli (batubara) nomor : 545/0388.B/PU/TAMBEN/20014 dari Dinas Pertambangan dan Energi Pemkab Muara enim tanggal 1 Pebruari 2014; ✓- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan asal barang No. 751/SKAB-DRP/Pertamb/2013 dari Bupati Muara enim PT. Astri Mining Resource Batu Licin tanggal 5 Juni 2014 ✓- 1 (satu) lembar surat asli proses permohonan IUP Operasi Produksi Khusus Pengakutan dan Penjualan An. Koperasi TNI-AL Jakarta 1 Januari 2013. ✓- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Muara Enim tentang Ijin Usaha Angkutan Umum untuk barang kepada Koperasi TNI-AL tanggal 18 Juli 2013. ✓- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Bupati Muara Enim No.503/02/KPTS/KPPT/2013 tentang Izin Usaha Angkutan Umum untuk Barang kepada Koperasi TNI-AL. ✓- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Nomor : 520/2379/KEP/IL06/2013 dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Lampung tentang Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dikeluarkan di Lampung tanggal 1 Januari 2013. ✓
B :	1.000 (seribu) karung batubara ✓
	dikembalikan kepada Terdakwa; ✓
C :	1 (satu) bundel asli sertifikat Sijil ✓
D :	1 (satu) lembar asli SPB (Surat Persetujuan Berlayar) ✓
E :	1 (satu) lembar asli Crew List ✓
F :	1 (satu) lembar asli surat pernyataan Nakhoda tentang keberangkatan kapal pada pukul 16.00 Wib Sunda Kelapa 12 Oktober 2014. ✓

Halaman 7 dari Hal 10 Putusan Nomor 188/PID/2016/PT.DKI



tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No.16/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor : 14/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 05 April 2016, yang dibuat oleh RINA PERTIWI, SH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 14/Pid.Sus/2016/PN.JKT.Utr tanggal 29 Maret 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 14 April 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 19 April 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 19 April 2016 dan telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terdakwa melalui surat No. W.10-04/4731/HK.01/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perihal Mohon bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding perkara Pidana No. 14/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr atas nama Terdakwa : LIM SUTRISNO ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada tanggal 26 Mei 2016 mengirimkan surat No. W.10-U4/4727/HK.01/05/2016, perihal mempelajari Berkas Perkara Pidana Nomor : 14/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 02 Juni 2016 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 14/Pid.Sus/2016/PN.JKT.Utr tanggal 29 Maret 2016 serta berkas perkara yang dimintakan banding a quo dan memori banding dari penuntut umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat

Halaman 8 dari Hal 9 Putusan Nomor 188/PID/2016/PT.DKI



bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang amarnya telah dikutip diatas telah tepat dan benar karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal baru yang dipertimbangkan lagi maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 14/Pid.Sus/2016/PN.JKT.Utr tanggal 29 Maret 2016, sudah tepat dan benar, karena itu dapat dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal 312 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ;---
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 14/Pid.Sus/2016/PN.JKT.Utr tanggal 29 Maret 2016, yang dimintakan banding tersebut -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **RABU** tanggal **29 JUNI 2016** oleh kami :**ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH.** dan **ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor.188 /Pid/ 2016/ PT.DKI. tanggal 20 Juni 2016, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari : **KAMIS**, Tanggal **30 Juni 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh :



SUHARTONO, SH.MH Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut,
tanpa dihadiri oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum ; _____

HAKIM ANGGOTA,

1. DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH.

2. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

SUHARTONO, SH.MH